



## Implementation of Indonesian Defense Diplomacy in the South Pacific Region

Jonni Mahroza<sup>1</sup>, Joni Widjayanto<sup>2</sup>, Ivan Yulivan<sup>3\*</sup>, Lukman Yudo Prakoso<sup>4</sup>,  
Muhammad Ikmal Setiadi<sup>5</sup>  
Universitas Pertahanan RI

**Corresponding Author:** Ivan Yulivan [ivan36yulivan@gmail.com](mailto:ivan36yulivan@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords* : Diplomacy, Papua, Pacific, Defense, Separatism

*Received* : 01 October

*Revised* : 27 October

*Accepted*: 28 November

©2023 Mahroza, Widjayanto, Yulivan, Prakoso, Setiadi: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

Domestically, Indonesia is also facing the dynamics of separatist movements and responding to cases of human rights violations in Papua, threats coming from support from Pacific countries for Papuan independence which then led Indonesia to create a "Look East Policy" as a form of its territorial defense efforts. This study utilized qualitative methods from scientific journals sourced from Google Scholar and official government websites which were then used as references in writing this article. Indonesia's defense efforts go through 2 aspects, namely external and internal. On the external side, the Indonesian government uses economic, cultural and defense diplomacy from the Indonesian Navy. To gather support from countries in the South Pacific and mitigate the risk of Papuan separatism becoming an international issue.

---

## Implementasi Diplomasi Pertahanan Indonesia di Kawasan Pasifik Selatan

Jonni Mahroza<sup>1</sup>, Joni Widjayanto<sup>2</sup>, Ivan Yulivan<sup>3\*</sup>, Lukman Yudo Prakoso<sup>4</sup>, Muhammad Ikmal Setiadi<sup>5</sup>

Universitas Pertahanan RI

**Corresponding Author:** Ivan Yulivan [ivan36yulivan@gmail.com](mailto:ivan36yulivan@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Diplomasi, Papua, Pasifik, Pertahanan, Separatisme

*Received :* 01 Oktober

*Revised :* 27 Oktober

*Accepted:* 28 November

©2023 Mahroza, Widjayanto, Yulivan, Prakoso, Setiadi: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Secara domestik, Indonesia juga menghadapi dinamika gerakan separatisme dan menanggapi kasus pelanggaran HAM di Papua, ancaman yang datang dari dukungan negara-negara Pasifik terhadap kemerdekaan Papua kemudian mengantarkan Indonesia untuk membuat kebijakan “*Look East Policy*” sebagai bentuk dari upaya pertahanan teritorialnya. Studi ini memanfaatkan metode kualitatif dari jurnal ilmiah yang bersumber dari Google Scholar dan laman resmi pemerintah yang kemudian dijadikan acuan dalam menulis artikel ini. Upaya pertahanan Indonesia melalui 2 aspek, yakni eksternal dan internal. Pada bagian eksternal, pemerintah Indonesia menggunakan jalur diplomasi ekonomi, budaya, dan pertahanan dari TNI AL. Untuk menggalang dukungan dari negara di Pasifik Selatan serta memitigasi risiko separatisme Papua menjadi isu internasional.

---

## PENDAHULUAN

Terjalinnnya hubungan kerja sama antar negara dilandasi oleh kepentingan nasional suatu negara. Suatu bangsa memerlukan bantuan dari negara lain pada era saat ini demi memajukan kepentingan nasionalnya. Negara-negara menjadi semakin bergantung satu sama lain sebagai konsekuensi dari pesatnya laju globalisasi dan demokrasi. Saat ini, tidak lazim bagi suatu negara untuk mencapai seluruh tujuannya tanpa membentuk aliansi dengan negara lain. Untuk membina hubungan kolaboratif yang positif dengan negara lain, upaya diplomasi yang efektif juga sangat penting. Kepentingan nasional Indonesia, menurut Buku Putih Pertahanan Indonesia, adalah terpeliharanya NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD N RI Tahun 1945 (Arief et al., 2021).

Ditengah dunia yang multipolar ini, diperlukan keluwesan dalam menavigasi aktor yang saling bersaing demi kepentingan nasional Indonesia. Kesempatan ini tergambar sejak awal millennium dan menguat dengan pecahnya perang Ukraina. Kesempatan ini dimanfaatkan pemain-pemain lain untuk tampil. China lompatan ekonomi luar biasa, dibarengi modernisasi militer, menjadi kandidat terkuat pesaing AS. Rusia rekonsolidasi diri di bawah kepemimpinan Putin. Aktor-aktor lain yang patut diperhitungkan dalam lingkungnya masing-masing juga bermunculan, seperti Uni Eropa (UE), India, Brasil, Turki, Afrika Selatan, Iran, dan Indonesia (Zhang, J., & Martin, 2021).

Pertanyaannya siapkah Indonesia mengambil momentum tersebut untuk menjadi aktor di panggung dunia. Beberapa tahun belakangan, kiprah Indonesia di kawasan dan global semakin diperhitungkan. Terlebih sejak keberhasilan menavigasi situasi geopolitik yang pelik saat menjadi presiden G20 tahun lalu. Indonesia bukan hanya berhasil menjaga G20 tetap utuh, tetapi juga membangkitkan kembali spirit kolaborasi dan menghasilkan proyek-proyek kerja sama konkret yang bermanfaat bagi negara berkembang.

Fokus selanjutnya adalah wilayah terdekat Indonesia yaitu Pasifik Selatan. Kawasan Pasifik Selatan semakin disorot di panggung geopolitik global. Tahun lalu, kehebohan ada di Kepulauan Solomon karena menandatangani perjanjian keamanan dan pertahanan dengan China. Kerja sama itu memunculkan kekhawatiran adanya pangkalan militer China di negara itu. Kini, giliran Papua Niugini menandatangani perjanjian pertahanan dengan Amerika Serikat yang memberi mereka akses ke berbagai pangkalan militer di tetangga timur Indonesia (Prakoso, 2021).

Perjanjian pertahanan dengan AS ini mengatakan bahwa AS bisa mengakses pangkalan udara maupun pelabuhan Papua Niugini jika dibutuhkan dan atas izin parlemen Papua Niugini. Sebagai balasan, Papua Niugini bisa mengakses satelit AS untuk memantau perairan mereka yang seluas 2,7 juta kilometer persegi (Widyarto et al., 2018). AS bisa secara rutin menurunkan kapal penjaga lepas pantai secara rutin di perairan Papua Niugini. Bahkan, atas nama Port Moresby, kapal-kapal AS itu bisa mencegat hingga menangkap awak kapal asing yang memasuki perairan Papua Niugini secara ilegal (Prakoso et al., 2020).

Melihat Papua Niugini, wajar jika banyak pihak skeptis apabila negara-negara adidaya ini memang benar-benar mempraktikkan kemitraan setara. Papua Niugini adalah negara berkembang yang kaya akan SDA. Beberapa yang

terkenal adalah gas alam dan beragam logam untuk membuat batere litium, termasuk nikel. Mengingat transisi global dari bahan bakar fosil ke kendaraan listrik, industri baterai lithium sangatlah penting (Suhirwan, 2021).

Letaknya juga strategis karena bisa mengakses Asia Tenggara, Australia, dan Selandia Baru. Papua Nugini adalah negara yang paling dekat dengan Guam, wilayah kekuasaan AS tempat pangkalan militer mereka berada. Ditengah kepungan pangkalan militer AS dan China di Pasifik Selatan. Penting bagi Indonesia untuk menjaga kepentingan nasionalnya serta menjaga stabilitas dan perdamaian di Kawasan Pasifik Selatan (Kementerian Luar Negeri RI, 2019).

Secara domestik, Indonesia juga menghadapi dinamika Gerakan separatisme dan menanggapi kasus pelanggaran HAM di Papua, ancaman yang datang dari dukungan negara-negara Pasifik terhadap kemerdekaan Papua kemudian mengantarkan Indonesia untuk membuat kebijakan "*Look East Policy*" sebagai bentuk dari upaya pertahanan teritorialnya dan juga untuk mempertahankan hubungan dengan negara-negara Kawasan Pasifik Selatan (Hasanah, 2021). *Look East Policy* merupakan langkah kebijakan Indonesia dengan wilayah Pasifik Selatan dalam bentuk meningkatkan bantuan ke negara-negara Pasifik Selatan. Kebijakan ini memberikan prioritas utama pada kerja sama pembangunan bilateral, trilateral, dan multilateral dengan kawasan Pasifik Selatan (Rahmadani, 2022). Bentuk diplomasinya berupa kerja sama ekonomi, pemberian bantuan dalam aspek kemanusiaan, dan menjadikan budaya sebagai instrumentnya.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. *Teori Implementasi*

Makna implementasi menurut Sabatier & Mazmanian (1983) implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

### 2. *Teori Diplomasi*

Teori diplomasi menurut Sir Harold Nicolson (1988) ialah "salah satu alat penting dalam mewujudkan kepentingan nasional suatu negara". Diplomasi menjadi alat utama guna mencapai kepentingan nasional yang berhubungan dengan negara lain atau organisasi internasional. Lewat diplomasi, suatu negara bisa bentuk citranya. Di hubungan antar negara, diplomasi sering kali dilaksanakan sangat dini ketika suatu negara ingin jalin hubungan bilateral dengan negara lain sehingga keduanya dapat kembangkan hubungannya.

### 3. *Teori Pertahanan Negara*

Dalam buku putih Pertahanan Negara (2015), dijelaskan bawah Pertahanan Negara merupakan segala upaya pertahanan yang bersifat semesta, dengan mengikut sertakan seluruh warga negara dalam usaha pertahanan negara. Pertahanan negara merupakan kekuatan bersama antara sipil dan militer untuk

menjamin integritas wilayahnya, perlindungan dari orang dan/atau menjaga kepentingan-kepentingannya dari ancaman-ancaman. Pertahanan nasional dikelola oleh Kementerian Pertahanan. Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang pertahanan Negara pada pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa, "Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara."

## **METODOLOGI**

Studi ini memanfaatkan metode kualitatif dari jurnal ilmiah yang bersumber dari Google Scholar dan laman resmi pemerintah yang kemudian dijadikan acuan dalam menulis artikel ini. Dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif deskriptif, analisis yang dihasilkan kemudian dapat menjabarkan topik yang berkaitan dengan perspektif topic pada jurnal terdahulu. Penulis juga menggunakan aplikasi *Harzing: Publish or Perish 8* untuk mempermudah penulis dalam proses pengumpulan data. Sesudah data dihimpun lalu dilaksanakan analisa dimana data tersebut ditelaah dan dipilah berdasarkan kebutuhan penelitian hingga dapat ditarik kesimpulan dan dikembangkan lagi. Penggunaan aplikasi mendeley sendiri berguna untuk mencantumkan nama peneliti sebelumnya.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Fakta geografis dan demografis menunjukkan Indonesia dapat mengaku sebagai bangsa Pasifik dan negara yang sebagian penduduknya Melanesia. Perlu diplomasi untuk meyakinkan kelaikan itu kepada berbagai pihak di luar negeri. Butuh afirmasi dan yustisi untuk membuktikan kelayakan itu kepada berbagai orang dan lembaga di dalam negeri. Indonesia perlu menunjukkan, orang Melanesia di negara ini diperlakukan setara (Davidson, 2019).

Penegasan terbaru kepada pihak di luar Indonesia dilakukan lewat serangkaian kegiatan di Bali, 5-8 Desember 2022. Indonesia menjadi tuan rumah Archipelagic and Island States (AIS) Forum, Indonesia-Pacific Forum for Development (IPFD), dan Bali Democracy Forum (BDF). Petinggi negara-negara dan organisasi negara Pasifik hadir dalam forum-forum itu.

Pejabat tinggi bangsa-bangsa Melanesia dan Polinesia, dua etnis utama di Pasifik Selatan, menghadiri rangkaian acara tersebut. Menteri Utama Niue, Dalton Tagelagi; Direktur Jenderal Melanesian Spearhead Group (MSG) Leonard Loema; hingga Penasihat Menteri Luar negeri Vanuatu Richard Kaltongga hadir. Mereka selalu ditempatkan dekat Menlu RI Retno Marsudi yang memimpin berbagai rangkaian pertemuan itu.

Hasil pendekatan itu, antara lain, para peserta IPFD setuju memasukkan isu kedaulatan dan keutuhan wilayah dalam pernyataan bersama. Di Pasifik, isu kedaulatan dan keutuhan wilayah sejak lama menjadi prioritas Indonesia. Sebab, sebagian negara Pasifik Selatan menyokong kemerdekaan Papua dari Indonesia.

Sebelum IPFD, Indonesia menggandeng MSG untuk menyelenggarakan pelatihan pemberdayaan sektor perikanan bagi bangsa-bangsa Melanesia. Di organisasi bangsa-bangsa Melanesia itu, Indonesia berstatus anggota rekanan

atau associate member sejak 2015. Indonesia mendapat status itu dalam sidang MSG di Kepulauan Solomon, salah satu negara yang sebagian politisinya pernah gencar mendukung kemerdekaan Papua. Status rekanan didapat setelah Indonesia diterima sebagai peninjau pada 2011. Indonesia bisa masuk MSG, antara lain, karena dukungan sekutu terdekatnya di Pasifik, Fiji. Lebih dari 10 tahun lalu, Menlu Fiji Ratu Inoke Kubuabola menyebut Indonesia sebagai negara dengan jumlah orang Melanesia terbesar.

Ada hampir 12 juta orang Melanesia di Nusa Tenggara, Maluku, serta Papua. Sementara gabungan populasi Melanesia di negara-negara lain tidak sampai 11 juta jiwa. Di antara bangsa-bangsa Pasifik, Fiji memang paling intensif didekati Indonesia. September lalu, Retno meresmikan pusat pelatihan pertanian di sana. Beberapa bulan sebelumnya, dua asrama untuk pelajar juga diresmikan di sana. Dana pembangunan asrama itu disumbang pemerintah dan warga Indonesia.

### **Kerjasama dan Bantuan Ekonomi**

Dengan kondisi negara yang hanya mengandalkan bantuan luar negeri, Indonesia kemudian mengambil langkah diplomasi baik multilateral maupun multilateral berupa penyaluran bantuan luar negeri kepada negara-negara di wilayah Pasifik Selatan. Diresmikannya "Indonesian AID" pada 2019 silam bertujuan untuk menguatkan kerja sama pembangunan internasional, kerjasama selatan-selatan dan triangular, pencapaian SDG's serta kontribusi dalam menjaga perdamaian dan kesejahteraan social. Ditahun yang sama tepatnya pada bulan Maret, Indonesia mengadakan Indonesia South Pacific Forum (ISPF) guna meningkatkan hubungan kerja sama ekonomi di bidang perdagangan, investasi, kerja sama teknis serta meningkatkan kapasitas diantara negara negara Kawasan Pasifik Selatan (Harris et al., 2019). Selain itu, Kemenko Polhukam juga mengajukan usulan anggaran tambahan sejumlah Rp 60 miliar. Dana ini dipergunakan untuk pengupayaan peningkatan citra Papua, kerja sama Indonesia - Pasifik Selatan, pengelolaan kerja sama keamanan perbatasan, dan lain sebagainya.

Dalam laman Kementerian Luar Negeri Indonesia (2022), pemerintah Indonesia mengadakan Indonesia Pacific Forum for Development (IPFD) pada 7 Desember 2022 lalu mendapat respon positif dari para peserta forum. Mereka menyambut baik komitmen Indonesia terhadap pembangunan di kawasan pasifik terutama dalam mempercepat proses pemulihan ekonomi pasca-pandemi. IPFD juga memasukkan Pasific Business Engagement dengan mengahdirkan Menteri Luar Negeri Papua Nugini dan Timor Leste serta tiga lokakarya dengan mengusung topic pengurangan resiko bencana: peningkatan kapasiitas baagi UMKM dan pemberdayaan perempuan. Dalam aspek kemanusiaan, Indonesia telah menandatangani perjanjian Hibah untuk Pemerintah Kepulauan Solomon, Timor Leste, dan Fiji pada 16 Desember 2022 lalu sebagai upaya penanganan pandemi. Selain itu, perjanjian ini juga akan digunakan untuk pembangunan Queen Victoria School (QVS) tahap II (tahap I pada 2019 silam) yang rusak akibat bencana angin topan Winston. Pendanaan bantuan ini berasal dari Indonesia AID (Cindyara, 2020).

### **Diplomasi Pendidikan dan Budaya**

Pemerintah Indonesia juga menawarkan beasiswa pendidikan bagi personil militer serta polisi dari negara Kawasan Pasifik Selatan. Seorang personel militer Fiji bersekolah di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) Angkatan 56 sebagai Perwira Siswa (Pasis) Pendidikan Reguler (Dikreg) tahun 2018 (Radar Indonesia, 2018). Salah satu perwira tinggi polisi Fiji mengikuti Program Pendidikan Angkatan Reguler (PPRA) LVIII di Lemhannas, RI, pada tahun yang sama (Lemhannas RI, 2018). Akan tetapi, rata-rata personil militer maupun kepolisian yang mengikuti program ini adalah perwira senior. Sebaiknya lebih banyak beasiswa pendidikan di sektor pertahanan dan keamanan diberikan kepada perwira junior yang memiliki riwayat dinas yang lebih panjang, sehingga pengetahuan yang diperoleh dapat segera diterapkan atau dibagikan kepada personel di negara asal mereka. Universitas Pertahanan Republik Indonesia (UNHAN RI) merupakan lembaga akademik di bawah naungan Kemenhan RI dengan spesialisasi ilmu pertahanan. Personil militer Pasifik Selatan dapat memperoleh manfaat dari berbagai program akademik, termasuk Manajemen Bencana, Keamanan Maritim, dan Strategi Pertahanan Maritim. Pemerintah Indonesia dapat memberikan beasiswa kepada perwira bawahan kepolisian dan militer di negara-negara Pasifik Selatan untuk mengikuti UNHAN RI.

Diplomasi budaya berada pada spectrum ideal dalam melakukan diplomasi. Hal ini dikarenakan pada spectrum ini, seseorang dapat melakukan soft power berupa branding, propaganda, dan diplomaasi public. Gagasan klasik tentang diplomasi budaya sebagian besar terbatas pada promosi budaya di suatu negara dengan tujuan memperkuat hubungannya dengan negara lain, meningkatkan kerja sama, dan juga untuk mempromosikan kepentingan nasionalnya. Seiring perkembangan jaman, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi kemudian memfasilitasi pergeseran ataupun pertukaran budaya yang terjadi dalam lingkup masyarakat ke lingkup privat (Bernadette et al., 2022).

Pada era rezim Joko Widodo, Indonesia memiliki 4 prioritas dalam melakukan kebijakan luar negerinya, salah satunya adalah memperluas keterlibatan regional di kawasan Indo-Pasifik. Selain inisiatif regionalisasi seperti MSG, Pacific Island Forum (PIF), dan Pacific Island Development Forum (PIDF), Kebijakan Melihat ke Timur menekankan keterlibatan Indonesia dengan negara di kawasan Pasifik (Bernadette, 2022).

Diplomasi Indonesia secara langsung melakukan pendekatan kebudayaan dengan negara di kawasan Pasifik. Indonesia juga harus memanfaatkan pengaruh Selandia Baru sebagai negara besar di Kawasan Pasifik Selatan. Selandia Baru sendiri berpengaruh bagi Indonesia dalam has menjembatani perbedaan pendapat antara Indonesia dengan negara Pasifik Selatan terkait masalah separatism yang dilakukan Papua (Pramono & Prakoso, 2021).

Untuk memperingati 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia dengan Selandia Baru, KBRI di Wellington mengadakan berbagai kegiatan seperti

seminar public, pameran foto, panggung seni, dan sebagainya pada 2018 lalu. Acara ini kemudian ditutup dengan sebuah konser music dengan mengusung tema “The Symphoni of Friendship”. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada hal layak umum bahwasanya Indonesia juga punya kemiripan budaya dengan masyarakat di kawasan pasifik Selatan yang seharusnya tidak menjadikan Indonesia sebagai masyarakat yang asing (Bernadette, 2022).

Selain itu, ada banyak program kerja sama dalam aspek kebudayaan yang dilakukan Indonesia dan negara-negara pasifik seperti Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI). Pada 27-29 Oktober 2015, pemerintah Indonesia mengadakan Festival Budaya Melanesia di Kupang, NTT dengan tujuan mengenalkan dan melestarikan budaya Melanesia kepada generasi muda serta memicu adanya interaksi budaya dari masing-masing negara yang terlibat. Bali Democracy Forum juga merupakan langkah inisiasi Indonesia guna memperbaiki citra Indonesia. Forum ini merupakan sebuah forum sharing experience bagi negara-negara yang sedang mengembangkan sistem demokrasi dengan beranggotakan baanyak negara terutama negara Pasifik Selatan.

### **Diplomasi Pertahanan**

Pelaksanaan diplomasi pertahanan yang dilaksanakan oleh TNI AL di kawasan Pasifik Selatan termasuk wujud dukungan terhadap kebijakan Look East Policy. Bentuk diplomasi yang dilakukan berupa pertemuan pejabat tinggi TNI AL, Navy to Navy Talks (NTNT), information sharing, pendidikan operasi dan latihan, kunjungan kapal perang (port visit) ke negara-negara Pasifik Selatan. Diplomasi ini mungkin menunjukkan keinginan tulus Indonesia untuk membina hubungan positif dengan negara di kawasan Pasifik Selatan melalui pelaksanaan misi non-kekerasan. Disisi lain, melalui kegiatan ini pula Indonesia dapat menunjukkan kekuatan yang dimilikinya sehingga dapat memberi efek deterance ke negara yang dikunjungi. Selain itu, kegiatan ini memberikan isyarat pada negaranegara di kawasan itu bahwasannya Indonesia mampu hadir di lingkup kawasan itu (Dipua et al., 2021).

Tujuan utamanya adalah pertahanan. Menyadari batas wilayah Indonesia memerlukan sistem pertahanan yang lebih tangguh dan lebih terintegrasi untuk memantau setiap pergerakan di wilayah perbatasan, Indonesia prihatin dengan kepergian Benny Wenda melalui perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Kerangka diplomasi pertahanan yang diusulkan Cottey saat ini sedang dimanfaatkan oleh TNI, terbukti dengan adanya kolaborasi latihan penjaga perdamaian antara Indonesia dan negara-negara Pasifik Selatan (termasuk Papua Nugini dan Fiji) serta pertukaran perwira angkatan laut yang difasilitasi oleh Kementerian Luar Negeri di Nauru. Beberapa negara Pasifik Selatan akan bekerja sama mengirimkan atase pertahanan, seperti yang dilakukan pada tahun 2018 di Fiji (Rachmad et al., 2021). Hasilnya, sistem pertahanan Indonesia yang mengedepankan kolaborasi mengalami kemajuan. Hal ini terutama berlaku jika berkaitan dengan karakteristik fisik Indonesia, sebuah negara kepulauan yang serupa dengan negara lain di Pasifik Selatan. Sebab itu, tingkat kolaborasi pertahanan ini harus ditingkatkan.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dukungan negara di kawasan Pasifik Selatan untuk gerakan separatis Papua berdampak pada munculnya ancaman baru bagi Indonesia. Upaya pertahanan Indonesia melalui 2 aspek, yakni eksternal dan internal. Pada bagian eksternal, pemerintah Indonesia menggunakan jalur diplomasi ekonomi, budaya, dan pertahanan dari TNI AL. Diplomasi ini berupa pemberian bantuan luar negeri ke negara di kawasan Pasifik Selatan, latihan militer bersama, serta acara ragam budaya. Upaya ini dilakukan demi memperbaiki citra Indonesia yang terlanjur buruk di kancan internasional. Pada aspek internal, pemerintah mengusahakan wilayah Papua untuk tetap tergabung dalam NKRI dengan cara memberikan program pembangunan wilayah pemberian otonomi khusus, dan program kesejahteraan rakyat Papua. Beragam upaya yang dilakukan pemerintah mulai dari rezim orde baru hingga sekarang. Upaya dalam aspek eksternal berpedoman pada kebijakan "*Look East Policy*". Upaya dilakukan untuk menjalin dan memelihara hubungan positif dengan negara-negara Pasifik Selatan melalui kebijakan ini. Diplomasi soft power menjadi penting untuk dilakukan karena jika menggunakan hard power malah akan memperumit situasi yang ada.

Saran yang perlu ditindaklanjuti Untuk memitigasi permasalahan internasionalisasi separatisme Papua serta menggalang dukungan dari negara Pasifik Selatan, Indonesia dapat melakukan langkah-langkah berikut sesuai dengan prinsip diplomasi pertahanan:

1. Sistem pertahanan maritim yang dimiliki negara-negara di kawasan Pasifik Selatan yang cakupan wilayahnya didominasi wilayah maritim tidak sebanding dengan yang dilaksanakan melalui perjanjian kerja sama pertahanan bilateral. Sebagai gambaran, Papua Nugini yang memiliki wilayah terluas di antara negara-negara di kawasan Pasifik Selatan, terus menerima bantuan militer dari Australia. Dukungan tersebut meliputi pembangunan infrastruktur, alutsista, dan personel militer.
2. Penunjukan Atase Pertahanan bagi negara di kawasan Pasifik Selatan. Upaya diplomasi masing-masing negara terutama dilakukan oleh delegasi dari Kementerian Luar Negeri. Indonesia menjalankan fungsi TNI yaitu diplomasi pertahanan dengan mengirimkan atase pertahanan ke seluruh negara yang menjalin hubungan kerjasama.
3. Indonesia meningkatkan kolaborasi dengan Australia tidak hanya untuk memperkuat hubungan bilateral tetapi juga untuk membangun saluran untuk menjalin hubungan dengan negara-negara seperti Vanuatu yang berada di garis depan dalam perselisihan separatisme Papua. Melalui kerja sama angkatan bersenjata antara Indonesia dan Australia yang diusulkan Panglima Angkatan Bersenjata Australia kepada Menteri Pertahanan RI, kerja sama tersebut terlaksana.

## PENELITIAN LANJUTAN

Bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai jembatan untuk melakukan penelitian lanjutan khususnya di bidang kajian diplomasi pertahanan. Sebaiknya memperbanyak literatur penelitian yang digunakan sehingga menghasilkan penelitian yang lebih akurat. Penelitian ini

hanya dilakukan dengan menggunakan metode kajian literatur dan studi pustaka dan terbatas. Untuk penelitian selanjutnya, pustaka yang digunakan bisa lebih luas dan ditambahkan metode wawancara untuk memperkuat argumen.

#### DAFTAR PUSTAKA

Arief, R., Prakoso, L. Y., & Risman, H. (2021). Understanding National Identity To Create Love and Proud of Being a Part of the Indonesian Nation. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(11), 2549–2556. <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/518>

Bernadette, S., Septiana, R., & Kusumawardhana, I. (2022). Music Matters: Diplomasi Budaya Indonesia terhadap Negara di Kawasan Pasifik Melalui 'the Symphony of Friendship' di Selandia Baru. *Indonesian Perspective*, 7(2). <https://doi.org/10.14710/ip.v7i2.50779>

Davidson, P. (2019). Introduction to the Indo-Pasific Security Challenges. *Journal of Indo-Pasific Affairs*, 4(2), 123.

Dipua, A., Prakoso, L. Y., & Nurdiansyah, D. R. (2021). Analysis of Defense Strategy Policies in Dealing With the Potential Negative Impacts of the South China Sea Conflict. *Jurnal Pertahanan: Media Informasi ttg Kajian & Strategi Pertahanan yang Mengedepankan Identity, Nasionalism & Integrity*, 7(1), 89. <https://doi.org/10.33172/jp.v7i1.860>

Harris, A., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2019). Strategi Pertahanan Laut dalam Rangka Ancaman Keamanan di Alur Laut Kepulauan Indonesia II. *Journal of Social and Political Sciences*, Vol.4 No.2 (2021), 5(1), 15–30. [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3838453](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3838453)

Ismiraj Uswatun Hasanah. (2021). *Look East Policy: Upaya Reposisi Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Kawasan Pasifik Selatan*. <https://www.ircorner.com/look-east-policy-upaya-reposisi-kebijakan->

luar-negeri-indonesia-terhadap-kawasan-pasifik-selatan/#:~:text=Dalam  
Look East Policy%2C Indonesia,pencapaian kepentingan nasional  
masing-masing.

Kementerian Luar Negeri RI. (2019). *Connecting the Connectivity in the Indo-Pacific: Indian Ocean and Rim Chapter*. Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik Dan Afrika.

Nicolson, S. H. G. (1988). *Diplomacy*. Institute For The Study of Diplomacy Edition.

Prakoso, L. Y. (2021). Implementation of Defense Policy Against Threats for Securing International Shipping Lanes in the Sunda Strait. *Journal of Social and Political Sciences*, 4(1). <https://doi.org/10.31014/aior.1991.04.01.263>

Prakoso, L. Y., Suhirwan, S., & Prihantoro, K. (2020). Sea Defense Strategy and Urgency of Forming Maritime Command Center. *Jurnal Pertahanan: Media Informasi ttg Kajian & Strategi Pertahanan yang Mengedepankan Identity, Nasionalism & Integrity*, 6(2), 200. <https://doi.org/10.33172/jp.v6i2.721>

Pramono, B., & Prakoso, L. Y. (2021). Political Policy for the Papuan Issue in the Context of National Defense. *Italienisch*, 11(2), 271–275. <http://italienisch.nl/index.php/VerlagSauerlander/article/view/118>

Rachmad, M., Suhirwan, S., Zaini, A., Bangun, E., Prakoso, L. Y., R, D. D. A., & Sianturi, D. (2021). Strengthening the Marine Defense Strategy of Lanal Banten Area through Empowerment of the Traffic Separation Scheme in the Sunda Strait. *Journal of Social and Political Sciences*, 4(1). <https://doi.org/10.31014/aior.1991.04.01.268>

Rahmadani, S. (2022). Diplomasi Indonesia Di Kawasan Pasifik Selatan Pada

Masa Pemerintahan Joko Widodo tahun 2015-2019. *Jom Fisip*, 9(5).

Sabatier, P. A., & Mazmanian, D. A. (1983). The Prospects for Effective Implementation of Regulatory Policy. In *Can Regulation Work?: The Implementation of the 1972 California Coastal Initiative* (hal. 1-26). Springer. [https://doi.org/10.1007/978-1-4684-1155-3\\_1](https://doi.org/10.1007/978-1-4684-1155-3_1)

Suhirwan, Lukman Yudho Prakoso, A. G. D. (2021). National Defense Policy by Strengthening Defense Strategy: Study of the Development of a Naval Air Base in Bengkulu. *Italienisch*, 11(2).

Widyarto, S., Prakoso, L. Y., Studi, P., Pertahanan, S., Pertahanan, F. S., Kurniawan, C., Widyarto, S., & Prakoso, L. Y. (2018). Implementasi Struktur Birokrasi Strategi Pertahanan Laut Menghadapi Ancaman Di Perairan Provinsi Sulawesi Tenggara. *Strategi Pertahanan Laut*, 4(1), 1-18.

Zhang, J., & Martin, J. (2021). *AUKUS Needs Economic Multilateralism*. Diakses dari *Wilson Center*: wilson center. <https://www.wilsoncenter.org/blog-post/aukus-needs-economic%02multilateralis>